BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU No.1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pembangunan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. bentuk badan hukum LKM adalah koperasi atau perseroan terbatas. Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (Jeni Susyanti, 2016, hlm. 141).

Pengertian koperasi menurut Masjfuk Zuhdi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berkerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela dan secara kekeluargaan, dimana koperasi yang memberikan persentase keuntungan setiap tahun kepada para anggota (pemegang saham) bertentangan dengan prinsip ekonomi yang melakukan usahanya atas perjanjian keuntungan dan kerugian di bagi antara para anggota (*profit and loss sharing*) dan besar kecilnya prosentase keuntungan

dan kerugian bergantung pada kemajuan dan kemunduran koperasi (Jeni Susyanti, 2016, hlm. 103).

Produk penghimpunan dan penyaluran dana secara teknis finansial yang dapat dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah termasuk BMT sangat beragam. Sedangkan kegiatan pembiayaan yaitu berdasarkan jual beli (al-bai) seperti murabahah, prinsip sewa atau multijasa (ijarah), prinsip kemitraan (partnership) berdasarkan prinsip pernyataan (musyarakah), prinsip bagi hasil (mudharabah), dan prinsip non-profit (Al-Qordhul Hasan) (Muzayyidatul Habibah & Alfu Nikmah, 2016, hlm. 115).

Mahmud syaltut berpendapat bahwa di dalam *syirkah ta'awuniyah* tidak ada unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut, akan tetapi koperasi dapat dipahami sebagai suatu *syirkah* (kerjasama) baru yang ditemukan para ulama besar manfaatnya, yaitu memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik saham, membuka lapangan kerja lagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah, dan sebagainya (Jeni Susyanti, 2016, hlm. 103–104).

Menurut UU Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Jeni Susyanti, 2016, hlm. 104).

Di Indonesia koperasi terbagi menjadi 2 yaitu; koperasi konvensional, dan koperasi syariah. Koperasi syariah yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan yaitu koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan unit jasa keuangan syariah koperasi (UJKS koperasi).

Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah yang kegiatannya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan unit jasa keuangan syariah koperasi (UJKS Koperasi) adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatannya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan (Burhanuddin, 2013, hlm. 131).

Sewa atau Ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus

mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut (Ascarya, 2013, hlm. 101).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin produk-produk yang terdapat yaitu pengelolaan Mini Market Antasari Mart, penyewaan kantin, pengelolaan Galery Anjungan Tunai Mandiri (ATM), pembiayaan konsuntif kerjasama Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) pegawai UIN Antasari dengan beberapa bank syariah, kerjasama Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) pegawai UIN Antasari dengan UIN Antasari dan unit pembiayaan syariah (UPS) yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah.

Adapun Ijarah adalah di sebut, jasa atau imbalan jasa. Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian. Menurut *sayyid sabiq* (Ascarya, 2007, hlm. 99).

Pembiayaan Ijarah adalah akad ijarah merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Pembiayaan dengan akad ijarah adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah (Mahriani, 2019, hlm. 79).

Dalam hukum islam, pembiayaan ijarah itu dapat berupa sewa jasa maupun sewa aset/properti. Ijarah sewa jasa pada praktiknya yaitu dengan mempekerjakan jasa seseorang kemudian memberikan upah sebagai

imbalan dari jasa yang disewakan, sedangkan ijarah sewa aset/ properti pada praktiknya yaitu dengan memindahkan hak kepada pihak lain untuk menggunakan manfaat dari aset/ properti tertentu dengan imbalan berupa upah sewa (ujrah) (Cut Vhintara & Rahmawaty, 2017, hlm. 148).

Q.S al-baqarah/2: 233.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ^٥
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu ingin di susukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertawakallah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Departemen Agama, 2006).

Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin merupakan peminjaman uang seperti Pembiayaan Rumah Sakit, Pembiayaan Sekolah, Pembiayaan kuliah, perbaikan motor, dan hotel. Untuk menerapkan prinsip syariah dibutuhkan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Syariah, dikarenakan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin menerapkan prinsip syariah pada 2018.

Akuntansi Syariah (Akuntansi Islam) adalah Akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan

lebih menekankan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Penekanan ini didukung oleh ratusan ayat yang dapat dijadikan sumber modal Akuntansi seperti kewajiban bertaqwa, berlaku adil, jujur mengatakan yang benar. Memilih yang terbaik, tidak menipu dan sebagainya. Instrumen kualitas ini sebagai landasan teoritis dari Akuntansi Islam. Sedangkan yang di anggap teknis diserahkan sepenuhnya kepada umatnya untuk merumuskan sesuai kebutuhan(Jeni Susyanti, 2016, hlm. 148–149).

Pada tanggal 19 september 2006, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) menyetujui untuk menyebarluaskan *Exposure Draft* PSAK syariah yang terdiri dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan: PSAK 102 tentang Akuntansi Mudharabah: PSAK 103 tentang Akuntansi salam: PSAK 104 tentang Akuntansi istisna: PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah: PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Selanjutnya, tanggal 26 februari 2008, IAI juga telah mengeluarkan 3 *exposure Draft* PSAK syariahtambahan yaitu: ED PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah, ED PSAK 108 tentang Akuntansi penyelesaian utang piutang Mudharabah, dan ED PSAK 109 tentang zakat dan infak/ sedekah. Akhirnya, IAI mengesahkan *explosure Draft* tersebut dan berlaku 1 Januari 2009 (Jeni Susyanti, 2016, hlm. 149).

PSAK 107 membahas mengenai standar akuntansi tentang pembiayaan ijarah mencakup pada PSAK 107 tentang Akuntansi Syariah Pembiayaan ijarah yang mulai berlaku secara efektif per 1 Januari 2008. PSAK 107

menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah. cakupan di dalam PSAK 107 meliputi: pengakuan dan pengukuran objek ijarah, pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen. Dalam kasus akad ijarah, Bank Syariah dapat bertindak sebagai pemilik objek sewa maupun sebagai penyewa. Di samping itu, standar PSAK 107 ini dapat pula di terapkan pada entitas lain yang melakukan transaksi ijarah (Rivai & Veithzal, 2008, hlm. 179).

Judul skripsi yang di teliti berdasarkan masalah bagaimana penerapan standar akuntansi syariah di dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Pegawai UIN Antasari Banjarmasin. Disini skripsi juga meneliti tentang pembiayaan ijarah apakah sesuai dengan PSAK 107 yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai Negeri UIN Antasari Banjarmasin yang diatas berjudul

“Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 107 Pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) UIN Antasari Banjarmasin”

B. Rumusah Masaalah

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Banjarmasin?

2. Apakah Akuntansi Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sesuai dengan PSAK 107?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Penerapan Akuntansi Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Banjarmasin .
2. Mengetahui Akuntansi Pembiayaan Ijarah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sesuai dengan PSAK 107.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademik

- a. Menambahkan khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi UIN Antasari Banjarmasin.

2. Instansi

- a. Memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pada masa yang akan datang.

3. Mahasiswa

- a. Menyelesaikan tugas akhir studi S1 sesuai kurikulum kampus UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Menambahkan wawasan dan pengetahuan berdasarkan permasalahan yang diteliti.

E. Definisi Operasional

1. Penerapan

Penerapan yaitu penanaman, pemasangan, pengenaan. (Kamisa, 1997, hlm. 549) maksudnya adalah KSPPS Pegawai Negeri UIN Antasari menerapkan pencatatan (Akuntansi) berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan PSAK 107 tentang pembiayaan ijarah.

2. Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah (Akuntansi Islam) adalah Akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan lebih menekankan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. (susyanti, 2016, hlm. 148)

3. PSAK 107

PSAK 107 Akuntansi ijarah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) pada 21 April 2009. PSAK 107 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi *ijarah* dalam PSAK 59: Akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. (Dewan Standar Akuntansi Syariah ikatan Akuntansi, 2017)

Pembahasan yang didalam PSAK 107 yaitu membahas tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian pada saat transaksi terjadi.

4. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah merupakan akad transaksi pemanfaatan hak guna tanpa disertai perpindahan kepemilikan. Pembiayaan dengan akad

ijarah adalah pembiayaan bank kepada nasabah untuk transaksi sewa-menyewa suatu barang atau jasa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh nasabah. (Mahriani, 2019, hlm. 79)

Pembiayaan ijarah yang termasuk dalam koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) UIN Antasari Banjarmasin disini menjelaskan tentang peminjaman uang untuk pembiayaan Rumah Sakit, pembiayaan Sekolah, dan hotel.

5. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Jenis koperasi yang satu ini didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang ringan. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit bergerak dalam lapangan usaha pembedakan modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya secara mudah, murah, dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. (Bashith, 2008, hlm. 105)

Pembiayaan syariah adalah bank syariah yang dominan adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Penyaluran pembiayaan menjadi bagian sangat penting bagi bisnis bank dan mengajukan keberpihakan bank bagi perbaikan ekonomi masyarakat pada khususnya dan kemajuan ekonomi nasional pada umumnya. (Ikatan Bankir Indonesia, 2015, hlm. 248)

F. Kajian Pustaka

1. Lia Aryatie, tahun 2018 dengan judul “perlakuan akuntansi syariah pembiayaan KPR IB pada Bank muamalat kantor cabang banjarmasin”. Skripsi, jurusan perbankan syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam. Dalam Penelitian lia aryatie ini lebih mengkaji mengenai Murabahah pembiayaan KPR IB pada bank muamalat. Persamaan terletak pada membahas pembiayaan. Perbedaan terletak pada tujuan, pembiayaan yang diteliti, dan tempat peneliti. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk penerapan akuntansi syariah PSAK 107 pada pembiayaan ijarah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) UIN Antasari Banjarmasin.
2. Aisyah Humaira Elfaya, tahun 2015 dengan judul “Analisis PSAK 107 atas pembiayaan ijarah pada PT. Bank Syariah Mandiri”. Skripsi, jurusan akuntansi, fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah malang. Dalam penelitian Aisyah humaira elfaya membahas mengenai bagaimana analisa PSAK 107 atas pembiayaan ijarah di PT. Bank Syariah Mandiri. Persamaan terletak pada pembahasan PSAK 107 atas pembiayaan ijarah. perbedaan terletak pada tujuan, dan tempat penelitian. Sedangkan penelitian ini untuk penerapan akuntansi syariah PSAK 107 pada pembiayaan ijarah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah KSPPS UIN Antasari Banjarmasin.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika penyusunan skripsi terdapat 5 (lima) bab sebagai berikut yaitu:

Bab 1 yaitu: latar belakang masala, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab 2 yaitu: landasan teori yang berhubungan dengan objek dalam penelitian yang di jadikan sebagai tolak ukur dan pedoman dalam penelitian.

Bab 3 yaitu: metode penelitian di gunakan untuk bagaimana penelitian di lakukan baik mengenai jenis, sifat, lokasi, subjek, objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data analisa data.

Bab 4 yaitu: penyajian data dan laporan penelitian berisi gambaran umum objek, dan hasil dari penelitian penerapan PSAK 107

Bab 5 yaitu: penutup dari penulisan skripsi yang menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan dari kesimpulan tersebut sehingga mendapatkan saran-saran sebagai pemecah dari permasalahan dalam instansi tersebut.